

Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Karantina Pertanian

Pedoman

2017





PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

**Bagian Perencanaan
Sekretariat Badan Karantina Pertanian**



**BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

TIM PENYUSUN

Bagian Perencanaan
Sekretariat Badan Karantina Pertanian

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa Pedoman pengukuran kinerja kegiatan lingkup Badan Karantina Pertanian telah dapat diselesaikan dengan baik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas dilakukan evaluasi kinerja. Dengan mengetahui capaian fisik kegiatan, maka akuntabilitas penggunaan anggaran dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dari waktu ke waktu seiring dengan penyerapan anggaran. Selain itu untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L dalam upaya meningkatkan kinerja.

Panduan ini antara lain berisi tentang cara penghitungan pencapaian *output/suboutput* kegiatan yang dilengkapi dengan contoh dan pembobotannya, seperti kegiatan yang ada di kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian antara lain kegiatan jasa perumusan kebijakan, uji terap, uji laboratorium, maupun kegiatan pengadaan barang baik infrastruktur maupun non infrastruktur. Dengan adanya pedoman ini diharapkan penghitungan fisik kegiatan secara periodik dapat selalu tersedia.

Jakarta, Mei 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
E. Pengertian Umum	3
BAB II. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB III. ASPEK EVALUASI KINERJA	5
A. Kegiatan yang dilakukan sekali selesai (1 – 5 hari)	7
B. Kegiatan yang dilakukan berproses (durasi lebih dari 1 bulan)	9
C. Kegiatan yang merupakan kegiatan rutin bulanan	10
D. Kegiatan belanja modal	11
E. Waktu Pengukuran Kinerja	13
BAB IV. PROSES EVALUASI KINERJA	14
A. Persiapan Evaluasi Kinerja	14
B. Pengumpulan Data	14
C. Pengukuran	15
D. Penilaian	22
E. Analisis	23
BAB V. PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA	24
BAB VI DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	25
BAB VII PENGHARGAAN DAN HUKUMAN	26
BAB V. PENUTUP	27
DAFTAR PUSTAKA	28

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Penyusunan Rancangan / Draft Permentan	7
Tabel 2. Penyusunan Pedoman	8
Tabel 3. Rapat Koordinasi/Temu koordinasi	8
Tabel 4. Seminar, Sosialisasi, Apresiasi atau Workshop	8
Tabel 5. Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis	8
Tabel 6. Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi	8
Tabel 7. Pengukuran fisik kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Karantina .	9
Tabel 8. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Metode Pemeriksaan Lab.Uji Standar KH	9
Tabel 9. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Metode Pemeriksaan Lab.Uji Standar KT	9
Tabel 10. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar Kehati Nabati/Hewani	9
Tabel 11. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar KH	10
Tabel 12. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar KT	10
Tabel 13. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Terap	10
Tabel 14. Pengukuran fisik kegiatan pembuatan ataupun penyempurnaan aplikasi TI	10
Tabel 15. Rekap capaian fisik per bulan	11
Tabel 16. Pengadaan Barang Non Infrastruktur	11
Tabel 17. Pengadaan Barang Infrastruktur	12
Tabel 18. Rekap Pengisian Matrik Pengukuran per bulan	12
Tabel 19. Rekap capaian realisasi anggaran dan output per bulan	12
Tabel 20. Pengukuran capaian indikator kinerja per bulan	13
Tabel 21. Pengukuran capaian indikator kinerja triwulan	13
Tabel 22. Pengukuran capaian kinerja jangka menengah	13
Tabel 23. Aspek evaluasi, data yang diperlukan dan sumber data	14
Tabel 24. Indikator, data yang diperlukan, pengumpulan data dan cara pengukuran	15
Tabel 25. Contoh Rencana penarikan dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari suatu eselon I	18
Tabel 26. Perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan	19
Tabel 27. Contoh Suatu eselon I memiliki tiga jenis keluaran dengan target dan realisasi	19
Tabel 28. Perbandingan target dan realisasi volume keluaran dan anggaran	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan RAPBN, monitoring dan evaluasi merupakan instrument penganggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran pemerintah, sebagai umpan balik dan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan anggaran di tahun selanjutnya dan sebagai peringatan dini atas capaian kinerja anggaran tahun berjalan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka pemenuhan fungsi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada *stakeholders* secara profesional, sekaligus untuk mempelajari faktor yang mendukung dan/atau menjadi kendala dalam pelaksanaan RKA-K/L.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/2011 bahwa Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) implementasi, (2) manfaat, dan (3) konteks. Utamanya pada evaluasi implementasi, diukur menggunakan empat indikator, yaitu (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian *output*, dan (4) efisiensi. Dalam operasionalnya, pemanfaat anggaran seringkali menemui kesulitan untuk mengukur perkembangan capaian *output*. Sedangkan serapan anggaran pada setiap *output* kegiatan dilaporkan relatif lancar secara bulanan *online* dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Data serapan anggaran tersebut kemudian dapat diakses oleh seluruh Kementerian/ Lembaga. Kondisi demikian menyebabkan analisis terhadap capaian implementasi kegiatan tidak dapat dilakukan dengan baik, karena di satu pihak anggaran terserap, namun tidak disertai dengan laporan capaian *output* fisik.

Salah satu penyebab tidak terlaporkannya perkembangan capaian *output* fisik adalah kesulitan pemanfaat anggaran 'menilai' tingkat capaian *output*, sementara pelaporan capaian *output* menjadi kewajiban seperti diamanatkan dalam PMK 249/2011, yang dilakukan secara bulanan. Untuk mengatasi hal itu Badan Karantina Pertanian mencoba menyiapkan pedoman pengisian fisik kegiatan. Pedoman ini melengkapi instrumen Sistem Monev, yang telah mengakomodasi instrumen PMK 249/2011, sehingga dimungkinkan setiap pemanfaat APBN Badan Karantina Pertanian dapat mengukur capaian *output* terhadap serapan anggarannya. Dengan demikian serapan anggaran dapat dilengkapi dengan capaian *output* fisik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman evaluasi untuk menyediakan acuan dalam mengukur capaian *output* fisik bulanan pada kegiatan yang didanai oleh APBN di 53 Satker Badan Karantina Pertanian baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sedangkan tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. Memberikan panduan dalam mengukur perkembangan capaian *output* setiap kegiatan;
2. Memberikan panduan dalam mengendalikan dan memantau perkembangan capaian *output* dalam penggunaan anggaran

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diuraikan dalam pedoman ini adalah :

1. Sistematika Penulisan
2. Aspek Evaluasi Kinerja
3. Persiapan Evaluasi Kinerja
4. Pengumpulan Data
5. Pengukuran
6. Analisis
7. Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;

E. Pengertian Umum

1. **Program**, adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
2. **Kegiatan**, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).
3. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L** adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
4. **Kinerja** adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. **Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja** adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.
6. **Satuan Kerja** adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab melaksanakan Kegiatan dari Program unit eselon I/Unit Organisasi dan/atau Kebijakan Pemerintah.
7. **Stakeholders** atau **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak dari internal dan/atau eksternal Eselon I/Dinas Provinsi/ UPT Nasional/ Dinas Kabupaten/ Kota, baik kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil Program.
8. **Output** (Keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
9. **Hasil (outcome)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
10. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Evaluasi sebaiknya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Ringkasan

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. DESKRIPSI PROGRAM

Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran program, termasuk penjelasan mengenai model logika informasi kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan antara permasalahan, hasil, keluaran, kegiatan dan masukan.

BAB II. IDENTIFIKASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Berisi penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi

BAB III. PERSIAPAN EVALUASI

Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses evaluasi, termasuk penyusunan desain pengumpulan data

BAB IV. PENGUMPULAN DATA

Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme pengumpulannya.

BAB V. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian beserta penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek tersebut.

BAB VI. ANALISIS

- a. Berisi penjelasan mengenai hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap aspek
- b. Perbandingan dan penjelasan antara hasil pengukuran dan penilaian periode saat ini dengan periode sebelumnya.

BAB VII. KETERBATASAN DALAM PROSES EVALUASI

Memberikan informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses evaluasi.

BAB VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

BAB III

ASPEK EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja terdiri atas 3 aspek yaitu aspek implementasi, manfaat dan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Evaluasi aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran dengan indikator yang diukur meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi.
2. Evaluasi aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai, dengan indikator yang diukur merupakan capaian indikator kinerja utama.
3. Evaluasi kinerja aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk kebijakan pemerintah.

Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan setiap tahun. Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Aspek evaluasi di badan karantina pertanian mencakup evaluasi terhadap capaian Indikator kegiatan utama sesuai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan penganggaran. Oleh karena itu evaluasi kinerja diharapkan dapat menggambarkan dan mengukur capaian indikator kinerja berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada Renstra tahun 2015 – 2019 Indikator Kinerja Utama Badan Karantina Pertanian adalah :

1. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan
2. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan
3. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
4. Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
5. Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan
6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Karantina Pertanian

Dalam mencapai target pada Indikator kinerja utama tersebut, diselenggarakan kerangka kegiatan besar sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi berupa kegiatan yang ada di Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
2. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani berupa kegiatan yang ada di Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
3. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati berupa kegiatan yang ada di Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya berupa kegiatan yang ada di Sekretariat Badan Karantina Pertanian
5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian berupa kegiatan yang ada di Balai Besar Uji Standar dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati berupa kegiatan yang ada di 50 (lima puluh) Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Pertanian

Dari kerangka kegiatan besar tersebut, jenis kegiatan yang perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi meliputi:

1. Kegiatan Kantor Pusat
 - a. Perumusan Kebijakan (Rancangan Peraturan Perundangan, Pedoman, Juklak/Juknis dengan tahapan kegiatan tertentu)
 - b. Workshop, Seminar, Sosialisasi, Rapat Komisi Ahli (1-3 hari)
 - c. Diklat Dasar Karantina (lebih dari 1 bulan)
 - d. Diklat Teknis (kurang dari 1 bulan)
 - e. Pelaksanaan Bimtek / Monev (dalam bentuk perjalanan dinas)
 - f. Pelaksanaan *Pre-Shipment Inspection (PSI)* atau pelaksanaan analisis risiko
 - g. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
2. Kegiatan Unit Pelaksana Teknis
 - a. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati
 - 1) Impor
 - 2) Ekspor
 - 3) Antar Area (Domestik Masuk dan Domestik Keluar)
 - b. Layanan Internal Overhead
 - 1) Peralatan dan Mesin
 - 2) Gedung dan Bangunan

- c. Layanan Perkantoran
- d. Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati
 - 1) Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium Karantina Pertanian
 - 2) Validasi Pengujian Laboratorium Karantina Pertanian
 - 3) Fasilitasi Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian
 - 4) Layanan Pemeriksaan Sampel Uji Laboratorium
- e. Pengembangan Teknik dan Metode Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati
 - 1) Uji Terap
 - 2) Bimbingan Teknis
 - 3) Desiminasi

Pada dasarnya pengukuran fisik dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu kegiatan yang dilakukan sekalai selesai, kegiatan yang dilakukan berproses, kegiatan yang merupakan kegiatan rutin bulanan, dan kegiatan belanja modal. Adapun pengukuran capaian kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan yang dilakukan sekali selesai (1 – 5 hari)

Pengukuran capaian kegiatan mengikuti tahapan dan konsensus pembobotan seperti pada tabel 1 – 8 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tahapan kegiatan perumusan kebijakan karantina hewan, karantina tumbuhan, keamanan hayati, pengawasan dan penindakan berupa Penyusunan rancangan permentan dan penyusunan pedoman, Rapat Koordinasi/Temu koordinasi, Seminar, Sosialisasi, Apresiasi atau Workshop, Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis, Perjalanan Dinas Monev mengikuti tahapan dan konsensus pembobotan seperti pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 6.

Tabel 1. Penyusunan Rancangan / Draft Permentan

No	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan Penyusunan Permentan	100	10	10
2.	Penyusunan Rancangan Permentan	100	10	20
3.	Pembahasan Rancancangan Permentan	100	10	30
4.	Workshop atau Uji Konsep Permentan	100	30	60
5.	Uji Publik Rancangan Permentan	100	20	80
6.	Finalisasi Penyusunan Rancangan Permentan	100	10	90
7.	Pelaporan	100	10	100

Tabel 2. Penyusunan Pedoman

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan Penyusunan Pedoman	100	10	10
2.	Penyusunan Pedoman	100	30	40
3.	Pembahasan Pedoman	100	20	60
4.	Uji Konsep Implementasi	100	20	80
5.	Finalisasi Penyusunan Pedoman	100	10	90
6.	Pelaporan	100	10	100

Tabel 3. Rapat Koordinasi/Temu koordinasi

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	50	80
3.	Pelaporan	100	20	100

Tabel 4. Seminar, Sosialisasi, Apresiasi atau Workshop

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	50	80
3.	Pelaporan	100	20	100

Tabel 5. Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	20	20
2.	Pelaksanaan	100	50	70
3.	Pelaporan	100	30	100

Tabel 6. Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	20	20
2.	Pelaksanaan	100	50	70
3.	Pelaporan	100	30	100

B. Kegiatan yang dilakukan berproses (durasi lebih dari 1 bulan)

Pengukuran capaian kegiatan mengikuti tahapan dan konsensus pembobotan seperti pada tabel 7 sampai dengan tabel 14 sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Karantina

Tabel 7. Pengukuran fisik kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Karantina

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	20	20
2.	Pelaksanaan	100	70	90
3.	Pelaporan	100	10	100

2. Pelaksanaan Uji Coba Metode Pemeriksaan Lab.Uji Standar KH

Tabel 8. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Metode Pemeriksaan Lab.Uji Standar KH

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	60	90
3.	Pelaporan	100	10	100

3. Pelaksanaan Uji Coba Metode Pemeriksaan Lab.Uji Standar KT

Tabel 9. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Metode Pemeriksaan Lab.Uji Standar KT

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	60	90
3.	Pelaporan	100	10	100

4. Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar Kehati Nabati/Hewani

Tabel 10. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar Kehati Nabati/Hewani

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	60	90
3.	Pelaporan	100	10	100

5. Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar KH

Tabel 11. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar KH

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	60	90
3.	Pelaporan	100	10	100

6. Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar KT

Tabel 12. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar KT

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	60	90
3.	Pelaporan	100	10	100

7. Pelaksanaan Uji Terap KH / KT

Tabel 13. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Terap

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	60	90
3.	Pelaporan	100	10	100

8. Pembuatan atau penyempurnaan aplikasi TI

Tabel 14. Pengukuran fisik kegiatan pembuatan ataupun penyempurnaan aplikasi TI

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1	Penyusunan Dokumen	100	20	20
2	Database Design	100	40	60
3	Interfase Design	100	20	80
4	Testing	100	10	90
5	Penetapan Implementasi	100	10	100

C. Kegiatan yang merupakan kegiatan rutin bulanan

1. Pengukuran fisik untuk kegiatan yang bersifat rutin bulanan dalam kondisi ideal pengukuran fisik per bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember secara berturut-turut adalah 8.33; 16.67; 25; 33.33; 41.67; 50; 58.33; 66.67; 75; 83.33; 91.67 dan 100.

2. Kegiatan bulanan berupa tingkat dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran sebagaimana tabel 15, dengan komponen:
 - a. Gaji dan Tunjangan
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Tabel 15. Rekap capaian fisik per bulan

No	Output/ Suboutput/ Komponen	% progress Capaian Per Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Gaji dan Tunjangan	8.33	16.67	25	33.33	41.67	50	58.33	66.67	75	83.33	91.67	100
2.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	8.33	16.67	25	33.33	41.67	50	58.33	66.67	75	83.33	91.67	100

D. Kegiatan belanja modal

1. Pengukuran Fisik Output Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kegiatan belanja modal dengan pengukuran perkembangan fisiknya sesuai dengan tahapan kegiatan, konsensus pembobotan seperti tabel 16.

Tabel 16. Pengadaan Barang Non Infrastruktur

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1	Pembentukan Tim Teknis dan Pokja Pengadaan/ Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa	100	5	5
2	Persiapan (Penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis)	100	10	15
3	Penandatanganan Kontrak/Pembayaran Uang Muka	100	25	40
4	Pelaksanaan Kontrak	100	35	75
5	Pemeriksaan Fisik Barang	100	15	90
6	Berita Acara Serah Terima Barang	100	10	100

Tabel 17. Pengadaan Barang Infrastruktur

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1	Pembentukan Tim Teknis dan Pokja Pengadaan/Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa	100	5	5
2	Penandatanganan Kontrak Perencanaan	100	10	15
3	Penandatanganan Kontrak Fisik dan Pembayaran Uang Muka	100	25	40
4	Pelaksanaan Kontrak/Pembayaran Termin I	100	35	75
5	Pemeriksaan fisik bangunan	100	15	90
6	Serah terima barang dan jasa	100	10	100

Tabel 18. Rekap Pengisian Matrik Pengukuran per bulan

Bulan:

Output/ Sub output dan tahapan kegiatan	Bobot	Anggaran			Output				Penjelasan		
		Pagu (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Progres sd bulan ini (%)	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tabel 19. Rekap capaian realisasi anggaran dan output per bulan

No	Output/ Suboutput/ Komponen	% Progres Capaian Per Bulan																							
		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
		Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	Output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output

E. Waktu Pengukuran Kinerja

Waktu pengukuran kinerja tahunan dilakukan setiap bulan, triwulan terhadap capaian Indikator Kinerja sebagaimana tabel 20 dan tabel 21. Sedangkan pengukuran capaian kinerja jangka menengah disesuaikan dengan periode rencana strategis (Renstra) Badan Karantina Pertanian berupa pengukuran capaian kinerja tiap tahun selama periode Renstra sebagaimana tabel 22.

Tabel 20. Pengukuran capaian indikator kinerja per bulan

No	Indikator kinerja	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agust		Sept.		Okt		Nov		Des	
		Target	Realisasi																						

Tabel 21. Pengukuran capaian indikator kinerja triwulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I		Semester I		Triwulan IV		Semester II	
		Target	capaian	Target	capaian	Target	capaian	Target	capaian

Tabel 22. Pengukuran capaian kinerja jangka menengah

Indikator Kinerja	Target & capaian	Tahun				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
	Target					
	Capaian					

BAB IV PROSES EVALUASI KINERJA

Proses Evaluasi Kinerja berupa tahapan evaluasi; persiapan evaluasi, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, analisis, dan rekomendasi. Evaluasi kinerja dilakukan dengan melalui tahap persiapan evaluasi kinerja, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian dan analisis. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan sejak RKAKL ditetapkan oleh menteri keuangan dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

A. PERSIAPAN EVALUASI KINERJA

Persiapan evaluasi Kinerja difokuskan untuk memandu mendapatkan data realisasi indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama program. Pada persiapan evaluasi kinerja meliputi:

- a. Mempersiapkan dan membuat model logika informasi kinerja
Memuat gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan. Model logika informasi kinerja didasarkan data dalam dokumen RKAKL.
- b. Inventarisasi dan identifikasi berbagai indikator dan target kinerja
Melakukan inventarisasi dan identifikasi apa yang direncanakan atau yang dijanjikan. Identifikasi indikator dan target kinerja didasarkan data dalam dokumen RKAKL.
- c. Penyusunan desain pengumpulan data
Desain pengumpulan data difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama program.

B. PENGUMPULAN DATA

Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek implementasi, Aspek Manfaat dan Aspek Konteks seperti pada tabel 1:

Tabel 23 Aspek evaluasi, data yang diperlukan dan sumber data

Aspek Evaluasi	Data yang diperlukan	Sumber data
Aspek Implementasi	Pagu Anggaran	Data RKA-K/L*)
	Target volume keluaran	Data RKA-K/L*)
	Target indikator kinerja keluaran	Data RKA-K/L*)
	Rencana Penarikan dana	Data DIPA*)
	Realisasi anggaran	SP2D*)

	Realisasi volume keluaran	Laporan K/L (bukti serah terima, surat pernyataan, bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan)**)
	Realisasi indikator kinerja keluaran	Review dokumen, survey, atau FGD***)
Aspek manfaat	Target indikator kinerja utama	Data RKA-K/L*)
	Realisasi indikator kinerja utama	Review dokumen, survey, atau FGD***)
Aspek konteks	Data kependudukan, indikator ekonomi, indeks tingkat kemiskinan, data di bidang ekonomi, sosial, politik, arah kebijakan pemerintah dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yang terkait	Review dokumen, survey, atau FGD yang melibatkan pemangku kepentingan

Keterangan:

- *) saat ini jenis data telah tersedia dan input dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi sehinggalah tidak perlu melakukan input data berulang
- ***) data tersedia di K/L, tetapi belum dapat dipenuhi secara otomatis dalam aplikasi
- ***) saat ini jenis data tersebut belum tersedia dan untuk itu selama masa transisi 2 tahun, aspek ini tidak diukur

C. PENGUKURAN

Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun indikator, data yang diperlukan, pengumpulan data dan cara pengukuran seperti pada tabel 24.

Tabel 24. Indikator, data yang diperlukan, pengumpulan data dan cara pengukuran

Indikator	Data yang diperlukan	Pengumpulan data	Cara pengukuran
Penyerapan anggaran	Realisasi anggaran (RA)	SP2D*)	$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$
	Pagu anggaran (PA)	Data RKA-K/L*)	
Konsistensi antara perencanaan dan implementasi	Rencana penarikan dana (RPD)	Data DIPA*)	$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$
	Realisasi anggaran (RA)	SP2D*)	

Pencapaian keluaran	Realisasi volume keluaran (RVK)	Laporan K/L (bukti serah terima, surat pernyataan, bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan)**)	$PK = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RVK_{ke\ i}}{TVK_{ke\ i}} \times \frac{\sum_{j=1}^m \frac{RKK_{i\ ke\ j}}{TKK_{i\ ke\ j}}}{m} \right)}{n} \times 100\%$
	Target volume keluaran (TVK)	Data RKA-K/L*)	
	Realisasi indikator kinerja keluaran (RKK)	Review dokumen, survey, atau FGD***)	
	Target indikator kinerja keluaran (TKK)	Data RKA-K/L*)	
Efisiensi	Target volume keluaran (TVK)	Data RKA-K/L*)	$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RKA_{ke\ i}/RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i}/TVK_{ke\ i}} \right)}{n} \times 100\%$
	Realisasi volume keluaran (RVK)	Laporan K/L (bukti serah terima, surat pernyataan, bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan)**)	
	Pagu anggaran (PA)	Data RKA-K/L*)	
	Realisasi anggaran (RA)	SP2D*)	
Pencapaian Hasil	Realisasi indikator kinerja Utama (RKU)	Review dokumen, survey, atau FGD***)	$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RKU_{ke\ i}}{TKU_{ke\ i}}}{n} \times 100\%$ <p>Pengukuran ini berlaku 2 tahun setelah PMK diundangkan (Pasal 22)</p>
	Target Indikator Kinerja Utama (TKU)	Data RKA-K/L*)	

Keterangan: Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat

Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja

a. Penyerapan anggaran:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA: Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja

PA: Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja

Contoh: Suatu eselon I memiliki pagu anggaran TA.2011 sebesar Rp 10.000.000.000 dan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp 9.500.000.000, maka pengukuran aspek penyerapan anggaran sebagai berikut:

$$PA = 10.000.000.000$$

$$RA = 9.500.000.000$$

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

$$P = \frac{9.500.000.000}{10.000.000.000} \times 100\% = 95.00\%$$

b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RA : Realisasi anggaran seluruh satuan kerja

RPD : Rencana penarikan dana seluruh satuan kerja

n : Jumlah bulan

Tabel 25 Contoh Rencana penarikan dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari suatu eselon I

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran
Januari	800.000.000	800.000.000	-
Februari	800.000.000	1.600.000.000	100.000.000
Maret	800.000.000	2.400.000.000	300.000.000
April	800.000.000	3.200.000.000	500.000.000
Mei	800.000.000	4.000.000.000	1.250.000.000
Juni	800.000.000	4.800.000.000	1.800.000.000
Juli	800.000.000	5.600.000.000	2.100.000.000
Agustus	800.000.000	6.400.000.000	4.000.000.000
September	900.000.000	7.300.000.000	5.000.000.000
Oktober	900.000.000	8.200.000.000	7.000.000.000
November	900.000.000	9.100.000.000	8.000.000.000
Desember	900.000.000	10.000.000.000	9.500.000.000

Dari tabel tersebut, sebagai contoh pada bulan februari diperoleh perbandingan akumulasi realisasi anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi rencana penarikan dana (RPD) bulanan sebagai berikut:

RA bulan Januari = 0
 RA bulan Februari = 100.000.000
 RPD bulan Januari = 800.000.000
 RPD bulan Februari = 800.000.000

$$\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\% = \frac{RA \text{ Januari} + RA \text{ Februari}}{RPD \text{ Januari} + RPD \text{ Februari}} \times 100\%$$

$$= \frac{0+100.000.000}{800.000.000+800.000.000} \times 100\% = \frac{100.000.000}{1.600.000.000} \times 100\% = 6,25\%$$

Dengan cara yang sama diperoleh perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan untuk setiap bulan seperti pada tabel 26 sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan

Bulan	Penyerapan per Bulan	Bulan	Penyerapan per Bulan
Januari	0.00%	Juli	37.50%
Februari	6.25%	Agustus	62.50%
Maret	12.50%	September	68.49%
April	15.63%	Oktober	85.37%
Mei	31.25%	November	87.91%
Juni	37.50%	Desember	95.00%

Dari tabel di atas, dilanjutkan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

$$\frac{0.00\% + 6.25\% + \dots + 95.00\%}{12} = \frac{539.90\%}{12} = 44.99\%$$

c. Pencapaian Keluaran

$$PK = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \frac{\sum_{j=1}^m \frac{RKK \text{ (ke } j)}{TKK \text{ (ke } j)}}{m} \right)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- PK : Pencapaian keluaran RKKi : Realisasi indikator kinerja keluaran ke i
 RVK : Realisasi volume keluaran TKKi : Target indikator kinerja keluaran ke i
 TVK : Target Volume keluaran m : Jumlah indikator keluaran
 N : Jumlah jenis keluaran

Tabel 27. Contoh Suatu eselon I memiliki tiga jenis keluaran dengan target dan realisasi

Keluaran	Volume		Indikator Kinerja Keluaran		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TKK)	Realisasi (RKK)
Keluaran 1 (Orang)	50	45	IKK ke 1	5	3
			IKK ke 2	10	7
Keluaran 2 (Laporan)	3	3	IKK ke 1	3	3
			IKK ke 2	6	3
			IKK ke 3	5	5
Keluaran 3 (Sistem)	1	1	IKK ke 1	4	2
			IKK ke 2	3	1

Pengukuran pencapaian keluaran diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$PK = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \frac{\sum_{j=1}^m \frac{RKK \text{ i ke } j}{TKK \text{ i ke } j}}{m} \right) \times 100\%}{n}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{45}{50} \times \left(\frac{3}{5} + \frac{7}{10} \right) \right) + \left(\frac{3}{3} \times \left(\frac{3}{3} + \frac{3}{6} + \frac{5}{5} \right) \right) + \left(\frac{1}{1} \times \left(\frac{2}{4} + \frac{1}{3} \right) \right) \right) \times 100\%}{3} = 61.17\%$$

d. Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

PK	: Pencapaian keluaran	RVK	: Realisasi volume keluaran
RAK	: Realisasi anggaran per keluaran	TVK	: Target Volume keluaran
PAK	: Pagu anggaran per keluaran	n	: Jumlah jenis keluaran

Nilai Efisiensi:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

NE	: Nilai efisiensi
E	: Efisiensi

Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%.

Tabel 28 Perbandingan target dan realisasi volume keluaran dan anggaran

Keluaran	Volume		Anggaran	
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	50	45	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	3	3	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1	1	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RKA_{ke\ i}/RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i}/TVK_{ke\ i}}\right) \times 100\%}{n}$$

$$= \frac{\left(1 - \frac{3.800.000.000/45}{4.000.000.000/50}\right) \times 100\% + \left(1 - \frac{975.000.000/3}{1.000.000.000/3}\right) \times 100\% + \left(1 - \frac{4.725.000.000/1}{5.000.000.000/1}\right) \times 100\%}{3}$$

$$= \frac{(-5.56\% + 2.50\% + 5.50\%)}{3} = 0.81\%$$

Nilai efisiensi dari suatu eselon I tersebut yaitu:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$= 50\% + \left(\frac{0.81\%}{20} \times 50\right) = 52.02\%$$

e. Pencapaian Hasil (Aspek Manfaat)

$$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RKU_{ke\ i}}{TKU_{ke\ i}} \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

CH : Capaian Hasil

RKU : Realisasi indikator kinerja utama

TKU : Target indikator kinerja utama

n : Jumlah indikator kinerja utama

Contoh:

Suatu eselon I memiliki target hasil dari program sebagai berikut

IKU	Target	Realisasi
IKU ke 1	20%	14%
IKU ke 2	50%	40%

Dengan pencapaian hasil di atas diperoleh:

$$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RKU_{ke\ i}}{TKU_{ke\ i}} \times 100\%}{n}$$

$$CH = \frac{\left(\frac{14\%}{20\%} + \frac{40\%}{50\%}\right) \times 100\%}{2} = 75\%$$

D. PENILAIAN

Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja Hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan Program. Penilaian pada prinsipnya merupakan langkah awal untuk mengkonversi angka-angka hasil pengukuran menjadi sebuah informasi untuk dianalisis lebih lanjut.

Dalam melakukan penilaian didasarkan pada hasil pengukuran meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil.

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

Dengan

$$I = (I \times W_I) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NK : Nilai kinerja

I : Nilai aspek implementasi

P : Penyerapan anggaran

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK : Pencapaian keluaran

NE : Nilai Efisiensi

CH : Capaian hasil

WI : Bobot aspek implementasi

WP : Bobot penyerapan anggaran

WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

WPK : Bobot pencapaian keluaran

WE : Bobot efisiensi

WCH : Bobot capaian hasil

Selanjutnya setiap hasil pengukuran tersebut dikalikan dengan bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

a. Aspek implementasi (WI) : 33.3% terdiri atas

- 1) Penyerapan anggaran (WP) : 9.7%
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (WK): 18.2%
- 3) Pencapaian keluaran (WPK) : 43.5%
- 4) Efisiensi (WE) : 28.6%

b. Aspek manfaat : 66.7%

- 1) Pencapaian hasil (WCH) : 100%

Selanjutnya hasil perhitungan dari perkalian hasil pengukuran dan bobot menghasilkan nilai kinerja yang terbagi menjadi 5 tingkatan sebagai berikut:

- a. 100% - >90%: Sangat baik
- b. 90% - >80%: Baik
- c. 80% - >60%: Cukup
- d. 60% - >50%: Kurang
- e. ≤50% : Sangat kurang

Dari contoh sebelumnya, diperoleh nilai aspek implementasi sebagai berikut:

$$I = (I \times W_I) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E)$$

$$I = (95.00\% \times 9.7\%) + (44.99\% \times 18.2\%) + (96.67\% \times 43.5\%) + (52.02\% \times 28.6\%) = 74.33\%$$

Nilai kinerja yang dihasilkan dari eselon I tersebut sebesar 74.78%, maka nilai kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L eselon I tersebut termasuk kategori cukup

E. ANALISIS

Analisis bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi atas permasalahan atau hasil penilaian yang dilakukan. Analisis meliputi aspek Implementasi dan Manfaat serta Aspek Konteks dengan poin analisis sebagai berikut:"

Analisis Aspek Implementasi dan Manfaat

- a. Menjelaskan mengapa hasil pengukuran dan intepretasi menunjukkan tingkat tertentu;
- b. Menjelaskan keterbatasan yang dihadapi dalam menjelaskan setiap proses evaluasi;
- c. Membandingkan dan menjelaskan dengan hasil evaluasi periode sebelumnya;
- d. Melakukan identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran dan hasil.

Analisis Aspek Konteks

- a. Melakukan identifikasi dan analsis kesesuaian antara kebutuhan dan /atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dengan hasil yang ditargetkan;
- b. Melakukan analisis kesesuaian antara keluaran yang ditargetkan dengan capaian hasil;
- c. Melakukan analisis kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan pencapaian keluaran;
- d. Melakukan analisis kesesuaian dan ketepatan masukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran;

BABV
PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

Laporan hasil evaluasi, batas waktu penyampaian laporan. Hasil evaluasi kinerja pada dasarnya bersifat tahunan dan disampaikan paling lambat 1 April setelah tahun yang dinilai. Laporan yang disusun disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bapenas dengan format mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri Keuangan

BAB VI

DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Penggunaan aplikasi monev kinerja penganggaran. Dalam rangka evaluasi kinerja penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran memfasilitasi kebutuhan sistem informasi berupa aplikasi Monev. Namun sehubungan dengan adanya Arsitektur dan Informasi Keuangan (ADIK), sistem hanya memfasilitasi sampai dengan tingkat output disesuaikan dengan keperluan Kementerian Keuangan, sehingga tidak dapat lebih detail. Oleh karena itu diperlukan mekanisme, sistem Monev yang dapat melihat sampai dengan tingkat di bawah output agar dapat lebih detail.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

Kedisiplinan dan komitmen satker dalam melakukan pengisian realisasi dan capaian output dalam monitoring dan evaluasi sangat diperlukan karena data ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan dan merupakan salah satu indikator kinerja bagi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi ini sebaiknya juga disertai dengan pemberian penghargaan dan hukuman atas kedisiplinan dan komitmen untuk melakukan pelaporan data realisasi, capaian output dan indikator kinerja. Penghargaan dan hukuman tersebut dapat dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang diisepakati oleh kedua belah pihak penandatangan Perjanjian Kinerja.

BAB VII

PENUTUP

Ketentuan tindak lanjut yang akan diberlakukan mengenai masa transisi dan ketentuan teknis.

- a. Masa transisi: pengukuran pencapaian keluaran dan capaian hasil dilaksanakan paling lambat 2 tahun (masa transisi) setelah PMK 249 diundangkan. Masa transisi tersebut digunakan untuk memperbaiki rumusan indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama. Selama masa tersebut, pengukuran pencapaian keluaran dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian setiap jenis keluaran pada setiap satuan kerja yang diperoleh dengan membandingkan realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran, dan bobot untuk aspek implementasi dan aspek manfaat selama 2 tahun tersebut menjadi 100% aspek implementasi dan 0% aspek manfaat
- b. Ketentuan teknis: ketentuan teknis diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran

DAFTAR PUSTAKA

[PMK] Peraturan Menteri Keuangan. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Kementerian Keuangan Republik Indonesia